



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2021 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS ✓
2.	BANTEN POS	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2022
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
8 MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Tatu Serahkan LKPD Ke BPK Pekab Serang ke BPK

SATELIT NEWS, SERANG - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten, Senin (7/3). Tatu berharap pada tahun ini dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tatu mengatakan, Pemkab Serang sudah 10 tahun berturut turut mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Banten. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Serang sudah pada trek yang benar dan sudah memenuhi standar akuntansi serta aturan yang ada.

"Dan dari tahun ke tahun Alhamdulillah di beberapa tahun terakhir Opini WTP kami tanpa catatan. Tentunya apresiasi saya selaku kepala daerah kepada tim penyusun LKPD jajaran Pemda Kabupaten Serang yang terus punya keinginan memperbaiki kinerja, termasuk dalam laporan keuangan," ujarnya.

Dia berharap Kabupaten Serang seperti tahun-tahun sebelumnya bisa memenuhi kriteria



SERAHKAN LKPD: Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah didampingi Sekda Kabupaten Serang menyerahkan LKPD tahun 2021 kepada BPK RI Perwakilan Banten.

serta mengungkapkan semua kegiatan penggunaan keuangan dengan benar dan lengkap.

"Insya Allah rasanya kami memeriksa juga ke bawah dan tim semua OPD tidak ada penyimpangan (leporan keuangan) ditahun 2021. Mudah mudahan kami bisa meraih WTP lagi yang tentunya tanpa catatan, karena progresnya sudah bagus, masa turun lagi," ujarnya.

Pihaknya merupakan yang

menyerahkan LKPD tahun 2021 paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran selesai atau akhir Maret. Namun Pemkab Serang melakukan lebih awal dibandingkan tujuh kabupaten/kota lain. Sementara Pemprov Banten telah menyerahkan LKPD pada Februari lalu.

Novie memastikan, setelah LKPD diterima pihaknya melanjutkan pemeriksaan terperinci. Paling lambat dua bulan setelah diterima, dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada pemerintah daerah. "Insya Allah, jika tidak ada kendala, pada 7 Mei kami akan menyerahkan LHP kepada DPRD dan Ibu Bupati," ujarnya.

Atas laporan LKPD, BPK akan memberikan kriteria penilaian. Apabila semuanya sesuai akan diberikan nilai mulai dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan tidak memberikan opini.

"Kabupaten Serang selama 10 tahun terakhir sudah menerima WTP. Mungkin LKPD 2021, nanti kita lihat dengan standar pemeriksaan," ujarnya. (sidik/jarkasih)

pertama dari delapan kabupaten kota yang menyerahkan LKPD tahun 2021 karena BPK RI harus mengerjakan pemeriksaan 8 Kabupaten Kota lain dan provinsi.

"Kalau (menyerahkan LKPD) berurutan kan pekerjaan tidak terlalu numpuk," katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Novie Irawati Herni Pumama mengatakan, seluruh pemerintah daerah wajib me-